

Dakwah Multidimensi: Transformasi Sosial-Relijius Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Perwakilan Sumatera Barat, 1968-2000

Meuthia Aksyarina

Affiliation: Universitas Andalas

Email: reena_aksya@yahoo.co.id

Received: September 2025; Accepted: Oktober 2025

Abstrak

Artikel ini mengkaji transformasi strategis perjuangan para mantan tokoh Masyumi di Sumatera Barat dari arena politik praktis ke jalur dakwah dan pemberdayaan masyarakat melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada periode 1968-2000. Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis bagaimana DDII merespons tantangan pasca-PRRI dan maraknya kristenisasi dengan mengembangkan program-program multidimensi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi dakwah DDII tidak hanya terfokus pada syiar lisan (bil-lisan), tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata (bil-hal) dalam bidang kesehatan—seperti pendirian Rumah Sakit Islam Ibnu Sina—pendidikan—melalui revitalisasi Thawalib dan pendirian Akabah—serta pengiriman da'i secara masif ke daerah rawan. Meski efektif membangun ketahanan umat, studi ini juga mengungkap tantangan internal organisasi, seperti sistem regenerasi yang terhambat senioritas dan koordinasi antarbiro yang belum optimal, yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan organisasi ke depan.

Kata kunci: transformasi strategis, DDI, PRRI

Abstract

This article examines the strategic transformation of former Masyumi figures in West Sumatra from practical politics to the path of da'wah and community empowerment through the Indonesian Islamic Propagation Council (DDII) from 1968 to 2000. Utilizing historical methods, this research analyzes how DDII responded to post-PRRI challenges and the rise of Christianization by developing multidimensional programs. The findings reveal that DDII's da'wah strategy was not solely focused on oral propagation (bil-lisan) but was also realized through concrete actions (bil-hal) in the health sector—such as the establishment of the Ibnu Sina Islamic Hospital—education—through the revitalization of Thawalib and the founding of Akabah—as well as the massive deployment of preachers to vulnerable areas. While effective in building community resilience, this study also uncovers internal organizational challenges, including a regeneration system hindered by seniority and suboptimal inter-bureau coordination, which potentially affect the organization's future sustainability.

Keywords: strategic transformation, DDI, PRRI,

Pendahuluan

Dakwah pada hakikatnya merupakan upaya transformatif yang disengaja untuk mengarahkan individu, kelompok, atau masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, selaras dengan ajaran Allah dan tuntunan Rasul-Nya. Misi inilah yang diemban oleh para mantan tokoh Masyumi, yang bercita-cita membentuk umat sejati melalui proses islamisasi masyarakat secara *bottom-up*.¹ Guna mewujudkan ambisi tersebut, pada 27 Februari 1967, sejumlah ulama dan mantan tokoh Masyumi berkumpul dalam sebuah musyawarah di Masjid Al-Munawwarah, Jakarta, yang diadakan atas undangan pengurus masjid.² Pertemuan itu membahas perkembangan dakwah Islam, khususnya dalam konteks transisi politik pasca peristiwa G30S/PKI.³ Dari musyawarah itulah kemudian lahir sebuah lembaga bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), yang dalam Anggaran Dasarnya

menegaskan landasannya pada Ketakwaan dan Keridhaan Allah, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan intensitas dakwah Islamiyah di Indonesia.⁴

Keberadaan DDII dirancang sebagai suatu kekuatan pemersatu yang mampu menghimpun umat Islam yang terkotak-kotak oleh sekat-sekat organisasi, sehingga tercipta sinergi dan kerja sama yang terencana dalam pembangunan umat.⁵ Hingga tahun 1997, DDII telah membuka perwakilan di 27 provinsi, dimana 16 di antaranya, termasuk Sumatra Barat, telah mapan dengan memiliki cabang di tingkat kabupaten, sementara 11 perwakilan lain masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. DDII Perwakilan Sumatra Barat, yang diresmikan pada 25 Juli 1968 oleh Ketua Umum DDII M. Natsir, tercatat sebagai perwakilan pertama di luar Jakarta. Kepengurusan perdananya diketuai oleh Datuk

¹ Dewi Fortuna Anwar, "Kabah dan Garuda," *Prisma*, 4 April 1984, hal. 15.

² Tokoh yang hadir dalam musyawarah tersebut hamper 30 orang pemimpin ummat terkemuka, diantaranya Mr. Syaifuddin Prawiranegara, Mr. Mohammad Roem, Mr. Boerhanuddin Harahap, Buya H. A. Malik Ahmad, KH. Rusyad Nurdin, KH. Yunan Nasution, Dr. Ali Akbar, KH. Ghaffar Ismael, Buya H.M.D. Dt. Palimo Kayo, Buchari Tamam, KH. Saleh Iskandar, KH. Taufiqurrahman, KH. Abdullah Salim, KH. Faqih Usman, Zainal Abidin Ahmad, DR. Mohammad Natsir, KH. Nawawi Duski, Buya Duski

Samad, KH. Misbah, KH. Hasan Basri, DR. M. Rasyidi, DR. Bahder Djoha, dan lainnya. Mosed Abidin, "Dakwah Komprehensif," *Manuskrip*, hal. 116.

³ Thohhrir Luth, *M Natsir Dakwah dan Pemikirannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 55.

⁴ *Anggaran Dasar dan Perubahan dan Penambahan Akta DDII, Akta Notaris Syahrim Abdulmanan*, No. 4 tanggal 9 Mei 1967, Pasal 3 dan Pasal 4.

⁵ Hasanuddin Abu Bakar Dt. Radjo Angek. *Profil Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*. (Jakarta: PT Abadi, 2002), hal. 2.

H.M.D Palimo Kayo, mantan Ketua Masyumi Sumatra Tengah, dengan dukungan sejumlah tokoh seperti Buya Anwar, Buya H.M. Bakri, Dt. Rajo Sampono, serta kalangan muda seperti Mazni Salam dan Dt. Paduko Intan.⁶ Kehadiran perwakilan ini dimaksudkan untuk menghidupkan dakwah guna membangun negeri, menyampaikan syiar Islam, dan membentengi akidah umat.⁷

Pada fase awal, DDII Perwakilan Sumatra Barat mengambil peran strategis dengan menentang pendirian Rumah Sakit Baptis yang dianggap membawa misi kristenisasi pada tahun 1968. Sebagai respons dan alternatif, pada 1969 didirikan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina untuk memperkuat ketahanan akidah umat di bidang kesehatan. Dalam bidang dakwah, program utama sejak 1970 adalah pengiriman tenaga dai ke Kepulauan Mentawai dan daerah-daerah transmigran lainnya.⁸ Kemudian, pada 1972, melalui kerja sama dengan Rabithah Alam Islami, DDII mengirimkan sekitar

40 dai lulusan madrasah untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah, dengan tujuan mempersiapkan mereka menjadi dai di daerah transmigran. Di bidang pendidikan, lembaga ini terlibat dalam revitalisasi Thawalib Padang Panjang yang mengalami kemunduran pasca peristiwa PRRI dan G30S/PKI,⁹ serta berperan dalam pendirian Perguruan Tinggi Aqabah di Bukittinggi pada 1973.¹⁰

Struktur kepengurusan DDII Perwakilan Sumatra Barat awalnya terdiri atas pengurus harian sederhana, namun seiring kompleksitas kebutuhan dakwah, struktur ini dikembangkan dengan menambahkan biro-biro pendukung. Pergantian kepengurusan dilakukan setiap tiga tahun, dan dalam kurun 1968 hingga 2000 telah terjadi tujuh kali pergantian kepemimpinan. Gerakan dakwahnya bersifat responsif terhadap akar permasalahan umat, seperti dengan mengirim dai ke daerah rawan pemurtadan dan memberikan solusi praktis. Berbeda dengan organisasi massa

⁶ Wawancara dengan Datuk Tan Kabasaran, di Bukittinggi, tanggal 23 Oktober 2003.

⁷ Lukman Hakiem, Tamsil Linrung. *Menunaikan Panggilan Risalah Dokumentasi Perjalanan 30 Tahun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*. (Jakarta: tanpa nama penerbit, 1997), hal. 50-51.

⁸ H. Masoed Abidin, *Islam Dalam Pelukan Mukhtadin Mentawai 30 tahun Da'wah Ilallah Mentawai Mengapai*

Cahaya Iman 1967-1997, (Jakarta: Biro Khusus Dakwah Mentawai DDII, 1997), hal. 114.

⁹ Wawancara dengan Buya Masoed Abidin, di Padang, tanggal 8 September 2004.

¹⁰ Mestika Zed, *Riwayat Hidup Ulama Sumatra Barat dan Perjuangannya*, (Padang: Islamic Centre, 2001), hal. 174.

pada umumnya, sebagai lembaga yayasan, DDII Perwakilan Sumatra Barat tidak memiliki sistem keanggotaan maupun rekrutmen anggota.

Beberapa karya ilmiah telah membahas aspek tertentu dari DDII Perwakilan Sumatra Barat. Skripsi Yasri Azmi mengeksplorasi peran DDII dalam membina kehidupan beragama di Sumatra Barat,¹¹ sementara Linda Fauzia menulis biografi Buya H.M.D Datuak Palimo Kayo yang turut menyoroti perannya sebagai pendiri DDII.¹² Sulma Radliah mengkaji peran bimbingan bagi muallaf oleh DDII Pusat, dan H. Masoed Abidin mendokumentasikan perjalanan dakwah DDII di Mentawai.¹³

Namun, keseluruhan karya tersebut cenderung fokus pada satu aspek tertentu,¹⁴ sedangkan peran komprehensif DDII Perwakilan Sumatra Barat sebagai lembaga dakwah dengan program multidisiplin—meliputi kesehatan, pendidikan, dan penanganan kristenisasi—belum mendapat pembahasan yang utuh dan terintegrasi.

Penelitian ini mengkaji

perkembangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Perwakilan Sumatra Barat dari tahun 1968 hingga 2000, dengan fokus pada tiga persoalan utama: latar belakang pendiriannya, metode dan strategi dakwah yang diterapkan, serta alasan penetapan program kerja pada triad dakwah, kesehatan, dan pendidikan. Batasan temporal ini dipilih karena tahun 1968 menandai berdirinya perwakilan pertama DDII di luar Jakarta, sementara tahun 2000 merepresentasikan suatu fase transisi organisasi dengan pemindahan markas ke Padang dan penguatan struktural melalui pembentukan Biro Muslimat.

Tujuannya adalah untuk menganalisis konteks historis kelahiran lembaga ini, menguraikan pendekatan operasionalnya dalam membina akidah umat, serta mengidentifikasi capaian dan evolusi program-program utamanya sebagai sebuah entitas dakwah yang khas.

Secara konseptual, penelitian tentang organisasi ini berlandaskan pada teori Schein yang mendefinisikan organisasi sebagai suatu koordinasi rasional kegiatan

¹¹ Yasri Azmi, "Peranan DDII dalam Membina Kehidupan Beragama di Sumatra Barat," *Skripsi* Sarjana, (Padang: Fakultas Adab: IAIN Imam Bonjol, 2002).

¹² Linda Fauzia, "Buya Haji Mansur Daud Palimo Kayo: Profil Seorang Ulama dan Penghulu di Minangkabau," *Skripsi* Sarjana, (Padang: Fakultas Sastra UNAND, 1993).

¹³ Sulma Radliah, "Peran dan Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap Muallaf, Studi Kasus di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia," *Skripsi* Sarjana, (Jakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah, 2001).

¹⁴ H. Masoed Abidin, *op.cit.*

sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian kerja, hierarki, dan komunikasi. Sebagai objek kajian sejarah kontemporer dan lokal, kelahiran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dapat dipahami sebagai respons struktural para mantan tokoh Masyumi terhadap iklim politik Orde Baru, dengan memilih bentuk yayasan—sesuai UU No. 16 Tahun 2001—karena efisiensi pengesahan notarial dan fleksibilitas operasionalnya sebagai badan nirlaba di bidang sosial-keagamaan.

Landasan teologisnya merujuk pada Surah Saba' ayat 28, yang menegaskan misi universal dakwah, sementara kerangka operasionalnya tertuang dalam Akta Notaris No. 4 tahun 1967 yang menetapkan tujuan peningkatan mutu dakwah melalui penyiapan mubaligh, kerja sama antarlembaga, penyelesaian konflik internal, dan penggalangan dana. Karakter independen DDII sebagai lembaga non-partisan namun kooperatif semakin memperjelas posisi strategisnya dalam peta dakwah Indonesia.

Metode

Secara metodologis, penelitian ini mengaplikasikan metode sejarah

melalui empat tahap baku: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan data (heuristik) dilakukan melalui studi kepustakaan di berbagai perpustakaan dan arsip, serta studi lapangan via wawancara mendalam dengan para pelaku sejarah. Sumber primer tertulis yang dikumpulkan mencakup dokumen organisasi seperti Akta Notaris DDII, memo M. Natsir, pedoman Islamic Centre, serta publikasi internal seperti Media Dakwah dan Panji Masyarakat. Sementara itu, sumber primer lisan diperoleh dari wawancara dengan tokoh kunci seperti Buya Datuk Tan Kabasaran, Buya Masoed Abidin, dan Ir. Afdal, yang tidak hanya memberikan perspektif internal namun juga memungkinkan verifikasi silang untuk memastikan keobjektifan rekonstruksi sejarah organisasi ini di Sumatra Barat.

Hasil dan Pembahasan

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Perwakilan Sumatera Barat didirikan dalam konteks sejarah yang kompleks, ditandai dengan pembubaran Partai Masyumi oleh Pemerintah pada tahun 1960.¹⁵ Peristiwa PRRI yang melibatkan tokoh-tokoh Masyumi menjadi pemicu utama kebijakan ini, yang kemudian mengakibatkan hilangnya wadah politik bagi

¹⁵ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), hal. 386.

sebagian umat Islam.¹⁶ Pada era Orde Baru, meskipun upaya reaktivasi Masyumi gagal, mantan tokohnya seperti M. Natsir tidak berhenti berjuang, namun beralih fokus dari politik praktis ke bidang dakwah.¹⁷ Peralihan ini dipandang sebagai strategi yang lebih tepat untuk membangun umat di tengah maraknya kegiatan kristenisasi dan tantangan akidah lainnya.¹⁸

Latar belakang pendirian DDII secara nasional bermula dari musyawarah ulama dan mantan tokoh Masyumi di Masjid Al-Munawwarah, Jakarta, pada 26 Februari 1967.¹⁹ Musyawarah tersebut menyimpulkan pentingnya

peningkatan kualitas dan integrasi dakwah, serta perlunya lembaga yang mampu merespons tantangan pemurtadan dan aliran sesat secara terorganisir.²⁰ DDII kemudian dibentuk dengan status yayasan untuk menghindari konfrontasi dengan pemerintah, memilih pendekatan dakwah bil-hal (aksi nyata) di samping dakwah bil-lisan.²¹ Di Sumatera Barat, pendirian perwakilan DDII pada 15 Juli 1968 tidak hanya dimaksudkan untuk syiar Islam, tetapi juga sebagai respons terhadap trauma sosial-politik pasca-PRRI dan upaya membangkitkan kembali harga diri masyarakat Minangkabau.²²

¹⁶ Lahirnya peristiwa PRRI dipicu oleh rasa ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat yang bersifat sentralistik. Sementara itu dibidang politik Divisi Banteng diciutkan menjadi satu brigade dengan lima batalyon kesatuannya yang terbesar di Sumatra Barat dan Riau. Pemerintah pusat tidak konsisten, lamban dalam menghadapi persoalan-persoalan daerah dan juga penyimpangan presiden Soekarno dari UUDS. Hal itu membuat mereka memproklamirkan suatu tandingan peristiwa revolusi. Nopriyasman, "Gaduh di Ranah Minang, Studi Tentang Pemberontakan PRRI di Sumatra Barat 1958-1961," *Laporan Penelitian*, (Padang: Fakultas Sanstra UNAND, 1997), hal 37. Lihat juga ⁴Zaiyardam Zubir, *op. cit*, Zaiyardam mengutip Bolland, B.J, dalam bukunya yang berjudul, *Pergumulan Islam di Indonesia*, terj, Safrudin Bakhar, (Jakarta: Grafiti Pres, 1985).

¹⁷ ⁵*Ibid*, hal. 108., Thohrir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 86.

¹⁸ Soebagijo I.N, *Riwayat Hidup dan Perjuangan H. Zainal Abidin Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1985), hal. 105.

¹⁹ Lukman Hakiem, Tamsil Linrung, *Menunaikan Panggilan Risalah Dokumentasi Perjalanan 30 tahun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*, (Jakarta: tanpa nama penerbit, 1997), hal. 9.

²⁰ Faham baru itu bernama Islam Jama'at, setelah dicap sebagai aliran sesat oleh Pemerintah, organisasi tersebut berganti nama menjadi Lamkari, dan meleburkan diri ke dalam Golkar. Dan sekarang berganti nama menjadi LDII. Lihat juga Lukman Hakiem, Tamsil Linrung, *Menunaikan Panggilan Risalah*, *op.cit*.

²¹ "M. Natsir Politik Melalui Jalur Dakwah", *Tempo*, 2 Desember 1989., Tanpa nama penulis, *Menyukuri 24 tahun Dewan dakwah*, (tanpa tempat penerbit: tanpa nama penerbit, tanpa tahun terbit) hal. 150.

²² Penumpasan PRRI yang dilakukan oleh OPR ternyata disusupi oleh PKI, karena OPR direkrut dari anggota-anggota Pemuda Rakyat yaitu organisasi pemuda

Strategi dakwah DDII Perwakilan Sumatera Barat dirancang secara komprehensif, mencakup pendekatan filosofis-rasional untuk kaum terpelajar, pendekatan pengajaran untuk masyarakat awam, dan pendekatan diskusi untuk golongan menengah.²³ Metode ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya segmentasi sasaran dakwah agar pesan dapat tersampaikan efektif. Selain itu, DDII menerapkan tiga langkah operasional: konservasi (melibatkan ulama dan tokoh masyarakat), reintegrasi (menyatukan mantan kader Masyumi), dan konsolidasi (bekerja sama dengan ormas Islam lain).²⁴ Pendekatan ini memadukan aspek spiritual dengan pembangunan sosial.

Struktur organisasi DDII Perwakilan Sumatera Barat berkembang dari bentuk sederhana

menjadi lebih kompleks seiring waktu, dengan pembentukan biro-biro khusus seperti Biro Organisasi, Biro Riset, Biro Muslimat, dan lainnya.²⁵ Biro Muslimat dibentuk dengan pertimbangan bahwa permasalahan perempuan memerlukan penanganan khusus yang tidak dapat sepenuhnya diatasi oleh laki-laki.²⁶ Sistem rekrutmen pengurus lebih mengutamakan track record dan komitmen terhadap umat daripada sistem keanggotaan formal, dengan pergantian kepemimpinan yang tidak selalu rutin tetapi berdasarkan kebutuhan dan regenerasi.²⁷

Salah satu program unggulan DDII di bidang dakwah adalah pengiriman da'i ke daerah terpencil dan transmigran seperti Mentawai, Sitiung, dan Pasaman, yang dianggap rawan kristenisasi.²⁸ Para da'i tidak hanya dilatih secara spiritual, tetapi

di bawah PKI. Sehingga dalam penumpasan PRRI yang dilakukan di desa-desa mereka memaksa masyarakat untuk masuk PKI kalau tidak ingin dibunuh. Hasril Chaniago dan Khairul Jamsi, Brigadir Jendral Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkyo Basa, Gubernur di Tengah Pergolakan, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hal. 319., *Wawancara* dengan Buya Masoed Abidin, di Padang tanggal 8 September 2004.

²³ Mubalig merupakan orang yang menyiarkan (menyampaikan) ajaran agama Islam atau juru dakwah. Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 594.

²⁴ Lukman Hakiem dan Tamsil Linrung, *Menunaikan Panggilan Risalah*

Dokumentasi Perjalanan 30 tahun DDII, (Jakarta: Tanpa Nama Penerbit, 1997), hal. 31.

²⁵ *Wawancara* dengan Ir. Afdal, di Padang tanggal 6 Februari 2005 dan Ali Mutasar tanggal 7 Februari 2005.

²⁶ *Wawancara* dengan Ali Mutasar, di Padang tanggal 7 Februari 2005.

²⁷ "Islamic center Pondok Mahasiswa Muslim yang Ideal," *Media Dakwah*, Muhharam 1416/Juni 1995., *Wawancara* dengan Ali Mutasar, di Padang, tanggal 7 Februari 2005.

²⁸ *Wawancara* dengan Rusydi SH, di Padang tanggal 1 Februari 2005., *Wawancara* dengan Bapak Jusril Jamarin, di Bukittinggi tanggal 24 Februari 2005.

juga dibekali keterampilan praktis dan kemampuan adaptasi sosial.²⁹ Untuk mendukung kerja lapangan, dibentuk Bakor Dakwah (Badan Koordinasi Dakwah) yang bertugas memantau dan mengevaluasi perkembangan dakwah di daerah.³⁰ Data tahun 1997 menunjukkan puluhan da'i berhasil membina ribuan muhtadin (orang yang mendapat hidayah) di Kepulauan Mentawai.³¹

Dalam konteks dakwah bil-hal, DDII juga aktif membangun sarana fisik seperti masjid dan mushalla, terutama di daerah transmigran. Pembangunan rumah ibadah tidak hanya difungsikan untuk salat, tetapi juga sebagai pusat aktivitas keislaman seperti TPA, majelis taklim, dan ceramah.³² Islamic Centre Al-Quds yang diresmikan tahun 1990 di Padang menjadi contoh lain dari pendekatan ini, difungsikan sebagai asrama mahasiswa yang menggabungkan pendidikan umum dengan pembinaan agama, dengan harapan melahirkan intelektual yang berimbang antara IPTEK dan IMTAQ.³³

Di bidang kesehatan, berdirinya Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina pada tahun 1969 merupakan respons langsung terhadap upaya kristenisasi yang dilakukan Yayasan Baptis melalui pendirian rumah sakit di Bukittinggi. Inisiatif ini dipelopori oleh M. Natsir melalui suratnya yang mendorong pembangunan alternatif rumah sakit Islam^[28]. Pembangunan RSI Ibnu Sina melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, serta mendapat bantuan dana dari dalam dan luar negeri. Keberadaan rumah sakit ini tidak hanya memenuhi kebutuhan kesehatan, tetapi juga menjadi simbol ketahanan akidah umat Islam.

Pada bidang pendidikan, DDII terlibat dalam pendirian Akademi Agama dan Bahasa (Akabah) di Bukittinggi, yang bertujuan mencetak calon ulama yang mampu menggali ajaran Islam dari sumber aslinya. Kurikulum Akabah awalnya independen dari pemerintah, sehingga ijazahnya lebih diakui untuk studi lanjut ke Timur Tengah daripada untuk keperluan formal di

²⁹ Wawancara dengan Buya Masoed Abidin, di Padang tanggal 8 September 2004., Wawancara dengan Bapak Anisral, di Padang tanggal 1 Maret 2005.

³⁰ Wawancara dengan Drs. Rusdi S.H, di Padang tanggal 1 Februari 2005., Wawancara dengan Datuk Tan Kabasaran, di Bukittinggi tanggal 26 Januari 2005.

³¹ Wawancara dengan Jusril Jamarin di Bukittinggi, tanggal 26 Januari 2005, dan

wawancara dengan Rusydi S.H, di Padang tanggal 1 Februari 2005.

³² Wawancara dengan Rusydi SH, di Padang tanggal 1 Februari 2005., Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Kasus Sumatra Thawalib*, (Yogyakarta: PT Tiara wacana Yogya, 1995), hal. 342.

³³ Wawancara dengan Buya Masoed Abidin, di Padang tanggal 8 September 2004.,

dalam negeri. Namun, perubahan status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) pada akhirnya justru menyebabkan penurunan minat mahasiswa, yang berorientasi pada ijazah yang diakui negara.

DDII juga memberikan bantuan signifikan kepada Perguruan Thawalib Padang Panjang, salah satu lembaga pendidikan Islam tradisional yang sempat terpuruk pasca-PRRI. Bantuan berupa perbaikan sarana fisik, pengiriman santri untuk studi ke Timur Tengah, dan penghubung dengan donator dari Timur Tengah menunjukkan komitmen DDII dalam revitalisasi pendidikan Islam. Dukungan ini memperkuat peran Thawalib sebagai salah satu pusat pendidikan Islam yang historis di Minangkabau.

Secara keseluruhan, eksistensi DDII Perwakilan Sumatera Barat merepresentasikan transformasi perjuangan dari arena politik ke ranah dakwah dan sosial. Program-programnya yang multidimensi—dakwah, kesehatan, dan pendidikan—tidak hanya bersifat reaktif terhadap tantangan zaman, tetapi juga visioner dalam membangun ketahanan masyarakat Muslim. Pendekatan dakwah bil-hal yang diusungnya terbukti efektif tidak hanya dalam membentengi akidah, tetapi juga dalam memberdayakan umat secara ekonomi dan sosial. Warisan perjuangan ini masih dapat dilihat dari lestarnya sejumlah institusi

yang dahulu digagas, seperti RSI Ibnu Sina dan Islamic Centre Al-Quds, yang hingga kini terus berkontribusi bagi masyarakat Sumatera Barat.

Kesimpulan

Pendirian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Perwakilan Sumatera Barat dapat dipahami sebagai transformasi strategis para mantan tokoh Masyumi dari perjuangan politik praktis ke jalur dakwah dan pemberdayaan masyarakat pada awal Orde Baru. Keberadaan perwakilan daerah ini tidak hanya berperan dalam menyampaikan syiar Islam, tetapi juga menjadi respons langsung terhadap dinamika lokal, seperti upaya kristenisasi melalui pendirian Rumah Sakit Immanuel di Bukittinggi. Program-program utamanya berfokus pada pembentengan akidah, dengan pengiriman da'i ke daerah rawan seperti Mentawai, Sitiung, Lunang, dan Pasaman sebagai bentuk strategi defensif-sekaligus-proaktif, yang didukung oleh pembentukan Bakor Dakwah untuk penanganan masalah secara terstruktur di tingkat lapangan.

Secara organisatoris, DDII Perwakilan Sumatera Barat menunjukkan fleksibilitas dalam merancang program sesuai konteks lokal, dimulai sejak kepemimpinan Buya H.M.D. Dt. Palimo Kayo. Namun, penelitian mengungkap sejumlah tantangan

internal, seperti sistem kepemimpinan yang cenderung mengutamakan senioritas, sehingga membatasi ruang partisipasi generasi muda. Selain itu, fungsi biro-biro dalam struktur organisasi belum berjalan optimal akibat rendahnya intensitas koordinasi dan konsolidasi. Hal ini terlihat dari minimnya interaksi antar-pengurus di luar rapat resmi, yang berakibat pada terpusatnya informasi hanya pada pengurus harian dan melemahkan responsivitas organisasi secara keseluruhan.

Ke depan, keberlangsungan

dan efektivitas DDII Perwakilan Sumatera Barat sangat bergantung pada kemampuan melakukan pembenahan internal, baik dalam hal profesionalisme pengelolaan organisasi maupun penguatan konsolidasi antar-elemen. Peningkatan kapasitas manajerial dan sistem regenerasi yang inklusif menjadi prasyarat penting untuk mempertahankan relevansi organisasi di tengah masyarakat. Tanpa upaya tersebut, eksistensi dan kontribusi organisasi dalam menjawab tantangan umat berpotensi tidak berkembang secara optimal.

Referensi

1. Arsip dan Manuskrip

Anggaran Dasar dan Perubahan dan Penambahan Akta DDII, *Akta Notaris Syahrim Abdulmanan*, No. 4, tanggal 9 Mei 1967.

Daftar Nama Dai Yang Bertugas Di Kepulauan Mentawai Di Bawah Kooedinasi DDII Perwakilan Sumatra Barat, 1997.

Daftar Nama-Nama Dai yang Dikoordinir Oleh DDII Pusat, 2000.

Daftar Nama Alumni Akabah/PTIA/STAI YKI-AKABAH

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,;Synopsis, Visi, dan Misi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,” *Manuskrip*.

H. Masoed Abidin,”Dakwah Kompehensif,” *Manuskrip*.

H. Masoed abiding, “Kiprah Dakwah di Sumatra Barat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina,” *Manuskrip*.

Pedoman Pengelolaan Asrama Srigunting/Islamic Centre Al Quds.

Proyek Pembangunan Masjid DDII Perwakilan Sumatra Barat.

Rumusan Keputusan Rapat Kerja DDII Perwakilan Sumatra Barat
“Pembagian Kerja DDII Perwakilan Sumatra Barat Periode 2000-2003,” tanggal 1-2 Oktober 2000.

2. Artikel Majalah dan Skripsi

Anwar, Dewi Fortuna,” Ka’bah dan Garuda,” *Prisma* 4, April 1984.

DDII Jakarta,” Metode Dakwah,” *Buletin Dakwah*, No. 29 tahun 1976.

Firman Agus,” Kehidupan Kaum santri: Studi Kasus Pondok Pesantren Perguruan Thawalib Padang Panjang 1963-1998,” *Skripsi* Sarjana, Fakultas Sastra UNAND, Padang, 2001.

H. Masoed Abidin,” Pesan Pak Hatta Dikala Peresmian RSI Ibnu Sina 30 Oktober 1969,” <http://www.yayasanrumahsakitibnusina.com>.

“Horison Pemikiran M. Natsir,” *Media Dakwah*, Rajab 1405 H / 10 April 1985, No. 130.

“Islamic Centre Pondok Mahasiswa Muslim yang Ideal,” *Media Dakwah*, Muharram 1416/Juni 1995.

Linda Fauzia,” Buya Haji Mansur Daud Datuk Palimo Kayo: Profil Seorang Ulama dan Penghulu di Sumatra Barat,” *Skripsi* Sarjana, Fakultas Sastra UNAND, Padang, 1993.

M.K, Muhsin, “Perspektif Kepemimpinan Dewan DAKwah,” *Suara Masjid*, Syawal-Zulqaidah, 1413/April 1993, No. 223.

“M. Natsir Politik Melalui Jalur Dakwah,” *Tempo*, 2 Desember 1989.

Nopriyasman,” Gaduh di Ranah Minang, Studi tentang Pemberontakan PRRI di Sumatra Barat 1958-1961,” *Laporan Penelitian*, Fakultas Sastra UNAND, Padang, 1997.

“RSI Ibnu sina Bukittinggi 25 tahun Mengemban Amanah Tokoh Besar,” *Media Dakwah*, Shafar 1416/Juli 1995.

Sulma Radliah, “Peran Bimbingan dan Penyuluhan Islam terhadap Muallaf, Studi Kasus di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,” *Skripsi* Sarjana, Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2001.

Yasri Azmi,” Peranan DDII Dalam Membina Kehidupan Beragama di Sumatra Barat ,” *Skripsi* Sarjana, Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol, Padang, 2002.

Zaiyardam Zubir, “ Islam di Kampus: Gerakan Pembaharuan Islam Masjid Salman ITB Bandung 1963-1986,” *Skripsi* Sarjana, Fakultas sastra Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1998.

3. Buku-Buku

Abrar Yusra, *Tokoh yang Berhati Rakyat, Biografi Harun Zain*, Jakarta: PT Intermedia, 1997.

Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.

Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Pustaka Utama Garfity, 1987.

Goscalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terjemahan oleh Nugroho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975.

Hamdi Gumanti El (ed), *Buya Datuk Palimo Kayo Dengan Generasi Penerus*, Jakarta: Pustaka Publika, 1997.

Hasanuddin Abu Bakar Dt. Radjo Angek, *Profil Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*. Jakarta: PT Abadi, 2002.

Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi, *Bigadir Jendral Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkyo Basa, Gubernur di Tengah Pergolakan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1998.

H. Masoed Abidin, *Islam Dalam Pelukan Mukhtadin Mentawai 30 tahun Da'wah Illallah Mentawai Mengapai Cahaya Iman 1967-1997*, Jakarta: Biro Khusus Dakwah Mentawai DDII, 1997.

I. N. Soebagijo, *Riwayat Hidup dan Perjuangan H. Zainal Abidin Ahmad*, Jakarta: Pustaka Antara, 1985.

Khittah Dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2001.

Mensyukuri 24 tahun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

- M. Amien Rais (ed), *Islam di Indonesia, Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Jakarta: CV Rajawali, 1989.
- M. Natsir, *Fiqud Da'wah*, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1978.
- Muchtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, Jakarta: Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, 1974.
- Tamsil Linrung dan Lukman Hakiem, *Menunaikan Panggilan Risalah Dokumentasi Perjalanan 30 Tahun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*, Jakarta, 1997.
- Thohrir Luth, M. Natsir *Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Prss, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia*, No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Bandung: Citra Umbara, 2002.